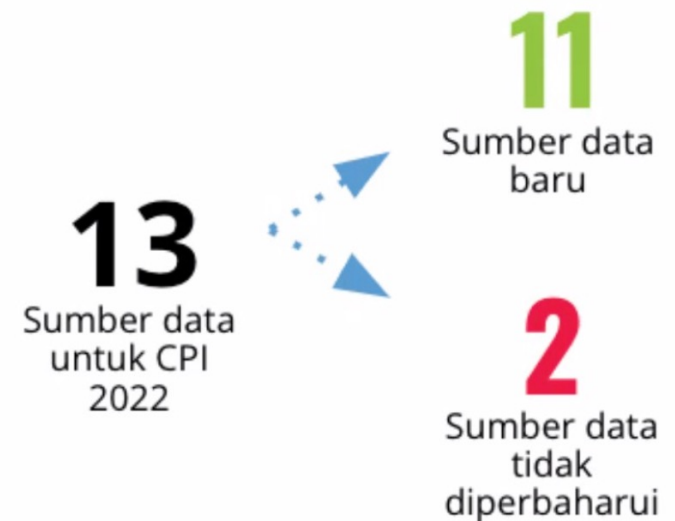


**RECONSOLIDATING  
“POPULIST AUTHORITARIANISM”?**

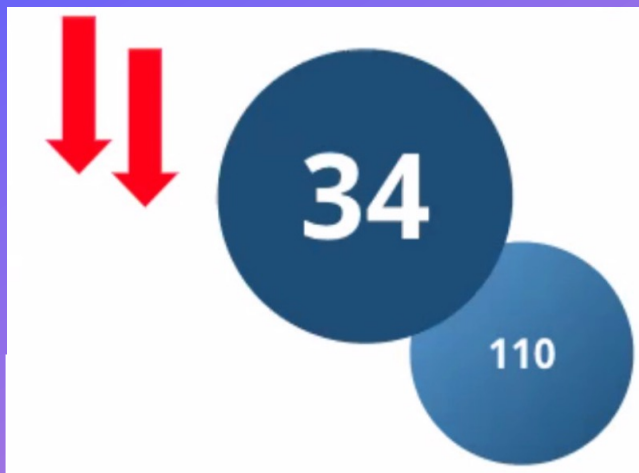
# APPRECIATING THE CPI'S ACCOUNTABLE METHODOLOGY

THERE IS NO CONSENSUS AMONG SCHOLARS AND RESEARCHERS ON THE MOST VALID & ACCURATE INSTRUMENT OR METHODOLOGY TO MEASURE GOVERNANCE PERFORMANCE, REFLECTED FROM THEIR DIFFERENT AND INCONSISTENT DEPICTIONS AND INTERPRETATIONS DUE TO THEIR VARIOUS METHODS, FOCUS, COMPONENT INDICATORS, AND ALSO BIASED PERCEPTIONS ON THE DEFINITION OF CORRUPTION (BENSACON, 2003; WILLIAMS AND SIDDIQUE, 2008; DICK AND BUTT, 2013: 11).

## CPI 2022: Metodologi



# "CPI 2022 AS THE SHARPEST DECLINE IN THE POST-REFORM INDONESIAN"



## CPI INDONESIA 2022:



# INDONESIAN DEMOCRACY DOES NOT SUPPORT GOOD GOVERNANCE

## CPI INDONESIA 2022:

21

### Political Risk Service

- Pembayaran ekstra dan suap terkait dengan izin ekspor-impor
- Konflik kepentingan antara politisi dan pelaku usaha
- Korupsi dalam sistem politik

35

### IMD Business School World Competitiveness Yearbook

- Ada atau tidak ada korupsi dalam sistem politik

39

### Global Insight Country Risk Ratings

- Risiko bahwa individu/perusahaan akan menghadapi suap atau praktik korupsi lainnya untuk menjalankan bisnis.

47

### Bertelsmann Stiftung Transformation Index

- Sejauh mana pejabat publik yang menyalahgunakan jabatannya dituntut atau dihukum?
- Sejauh mana pemerintah berhasil memberantas korupsi?

33

### Economist Intelligence Unit Country Risk Service

- Prosedur dan pertanggungjawaban dana publik yang jelas
- Penyalahgunaan sumber daya publik
- Profesionalisme Aparatur Sipil Negara
- Audit badan secara independen

37

### Political and Economic Risk Consultancy Seberapa parah korupsi di negara masing-masing

29

### Varieties of Democracy Project

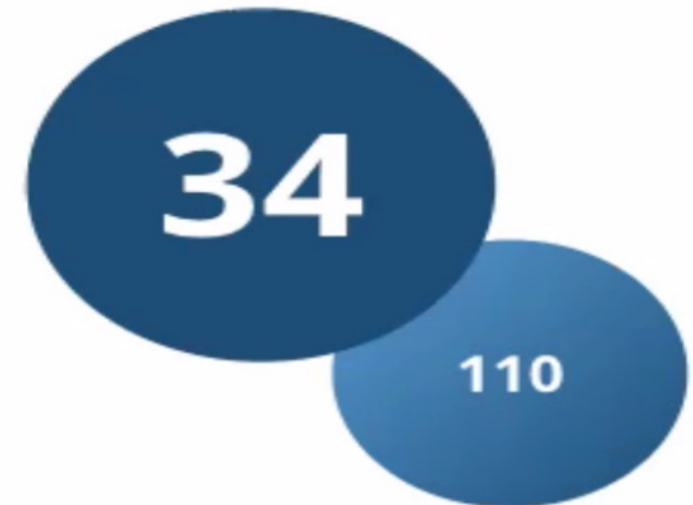
- Korupsi eksekutif, legislatif dan yudikatif.
- Korupsi di eselon tertinggi eksekutif (di tingkat penguasa/kabinet) di satu sisi, dan di sektor publik secara luas di sisi lain.
- Korupsi 'petty' atau korupsi 'grand', baik suap maupun pencurian; baik korupsi yang bertujuan untuk mempengaruhi pembuatan undang-undang dan mempengaruhi implementasi.

24

### World Justice Project Rule of Law Index

- Pejabat pemerintah di eksekutif, yudikatif, legislatif, polisi dan militer menggunakan jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

24



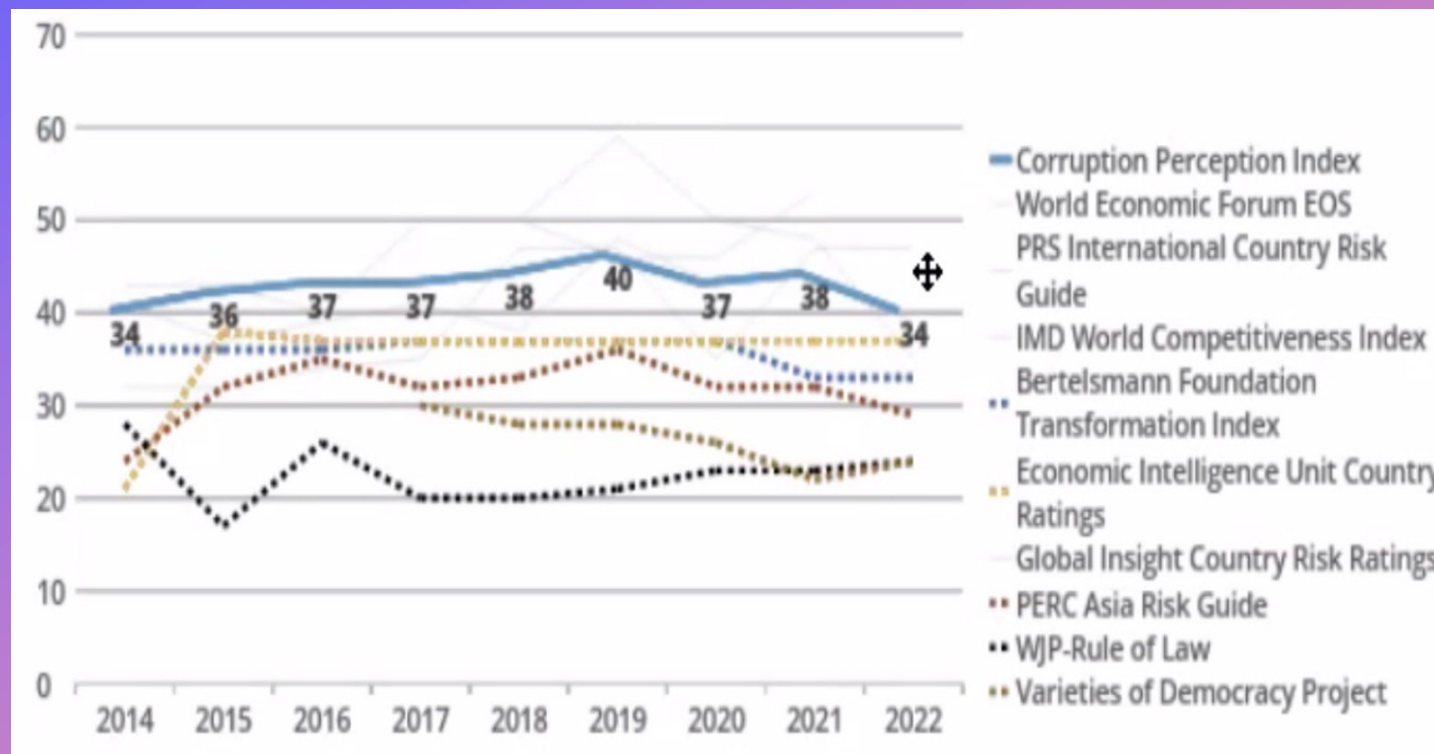
DEMOCRACY MUST NOT  
MERELY UNDERSTOOD AS **THE**  
**PRESENCE OF ELECTION,** BUT  
**REQUIRES** **THE RULE OF LAW,**  
**FREEDOM OF THE PRESS, AND**  
**VIBRANT CIVIL SOCIETY!**

# BUSINESS ACTORS' BIG QUESTION TO THE GOVERNMENT'S "CONSTITUTIONAL MORALLITY" & "POLITICAL WILL" TO SUPPORT DEMOCRACY & ANTI-CORRUPTION MEASSURES!

## SKEMA KOOPTASI KEKUASAAN YANG TERORKESTRASI?

1. KPK SEBAGAI KOREKTOR KEKUASAAN TELAH TERDELEGITIMASI
2. ORKESTRASI WACANA PERPANJANGAN MASA JABATAN PRESIDEN
3. ORKESTRASI WACANA PENUNDAAN PEMILU 2024
4. SKEMA PEMILU SERENTAK DI 271 KEPALA DAERAH RENTAN POLITISASI
5. WACANA PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA
6. OPERASI POLITIK-HUKUM BERLAKUKAN SISTEM PROPORSIONAL TERTUTUP

# MARGINALIZING ANTI-CORRUPTION DISCOURSE IN INDONESIAN DEMOCRACY



1. 'STABILITY & DEVELOPMENTALISM'
2. PRESIDEN JOKOWI VERSUS VETO PLAYERS?
3. APARAT PENEGAK HUKUM DILIHAT SEBAGAI ALAT UNTUK MENGENDALIKAN ISU POLITIK
4. ENERGI RAKYAT DIARAHKAN KE ISU POLARISASI & POLITIK IDENTITAS

**RECONSOLIDATING  
"POPULIST  
AUTHORITARIANISM"?**

**THE RISING NEW PATTERN  
OF OLIGARCIC NETWORK!**



ANTICIPATING

“THE PARABLE OF THE BOILING FROG”

